

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA BATU TAHUN 2012-2017

Oktavianus Rico

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi

Email: ricoxmx@yahoo.co.id

Abstrak: Perkembangan suatu kota dapat dilihat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah kota itu sendiri. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batu Tahun 2012-2017. Dengan adanya Peraturan Daerah, Pemerintah Daerah menjadi lebih terdesentralisasi, dari berbagai sudut pandang termasuk dalam hal otoritas, manajemen dan pendanaan. Dengan demikian, peneliti mengamati, menganalisis, dan mendeskripsikan efektivitas dan faktor-faktor pendukung dan penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Batu. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, instrumen penelitian yakni peneliti sendiri, *Interview Guide*, dan catatan lapangan, Teknik *sampling* meliputi *snowball sampling*, dan yang menjadi informan badan perencana pembangunan daerah, dinas pekerjaan umum, dinas pariwisata dan tokoh masyarakat. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Batu dapat dikatakan sudah efektif, dari perspektif komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Adapun faktor-faktor pendukungnya yakni : dukungan dari Masyarakat dan pemerintah, sumber daya manusia dan sumber daya alam Di Kota Batu memadai. faktor-faktor penghambat yakni : belum adanya pedoman yang mengatur tata cara penyelenggara pembangunan, Kurang optimalnya koordinasi perangkat didalam organisasi. Kurangnya sarana/prasarana dalam menunjang pelaksanaan kerja.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan Publik

Abstract: *The development of a city can be seen from the medium-term development plan of the city area itself. The local regulations of batu city no.7 of 2013 on the city's medium-term development plan batu years 2012-2017. With the local regulations, local governments become more decentralized, from various angles, including in terms of authority, management and funding. Thus researchers observe, analyze and describe the effectiveness and the factors supporting and inhibiting implementation of local regulations no. 7 of 2013 on the city's medium-term development plan batu years 2012-2017. Researchers used qualitative research methods. Collecting data through observation, interviews, and documentation, the researcher's own research instruments, interview guides and field notes, sampling techniques include snowball sampling and the informant regional development planning agency, department of tourism and public figures. The validity of the data using triangulation techniques. The implementation of local regulations no. 7 of 2013 on the city's medium-term development plan batu years 2012-2017 can be said to have been effective, perspective of communication, resources, disposition and bureaucratic structure. As for the supporting factors are the supports of society and government, human resources and natural resources in the town of batu adequate. Inhibiting factors is the absence of guidelines governing the procedures for organizing the construction, less optimal coordinating device in organization, lack the means or the infrastructure to support the implementation of the work.*

Key word : *public policy implementation*

PENDAHULUAN

Perkembangan suatu kota dapat dilihat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah kota yang telah dibuat dan direncanakan. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batu Tahun 2012-2017, dengan adanya

peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah ini suatu daerah membuat hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi lebih terdesentralisasi dari berbagai sudut pandang termasuk dalam hal otoritas, manajemen dan pendanaan. “Efektivitas Implementasi Peraturan Daerah Nomor. 07 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kota BATU” untuk melihat efektivitas implementasi peraturan daerah nomor 7 tahun 2013 tentang rencana pembangunan jangka menengah peneliti menggunakan empat isu pokok yang disarankan oleh George Edward III, yaitu Komunikasi (*communication*), Sumberdaya (*Resource*), Disposisi atau sikap (*disposition or attitudes*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structures*). Oleh karena itu penelitian ini berupaya untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Batu dan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam menghadapi implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Batu.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian menggunakan penelitian kualitatif dan berlokasi di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jl. Raya Sidomulyo Nomor. 13 Kota Batu Jawa Timur. Dalam proses penelitian diperoleh data dari sumber data primer dan sekunder. Dan Pengumpulan data dilakukan dengan : Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian, instrumen yang digunakan penelitian, yakni : peneliti sendiri, panduan wawancara (*interview guide*) dan catatan lapangan (*field note*). Dan pengambilan sampelnya, peneliti menggunakan teknik *snowball sampling*. Informasi yang diperoleh dari informan kemudian akan dianalisis dan diperiksa kebenaran informasinya, dengan teknik pemeriksaan triangulasi. Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik Miles and Huberman, yakni, Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batu tahun 2012-2017 di Kota Batu, bisadilihat dari empat (4) perspektif yang peneliti pergunakan yakni:

Komunikasi (*Communication*).

Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan itu dikomunikasikan kepada organisasi dan publik dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat. Dalam hal ini komunikasi merupakan hal yang sangat berfungsi dalam pencapaian sebuah program atau rencana yang di ingin dicapai, dimana keberhasilan suatu program kuncinya adalah komunikasi antara satu dengan lain suatu kegiatan keputusan kebijakan dalam pengimplementasian akan berjalan dengan baik dengan adanya komunikasi yang baik.

Dilihat dari perspektif Komunikasi (*communication*), pemerintah kota batu sudah efektif dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah, melalui sosialisasi perda tersebut, kemudian masyarakat juga menerima dengan adanya program pembangunan di Daerahnya.

Sumberdaya (*Resource*).

Berkenaan dengan ketersediaan sumberdaya pendukung, khususnya sumberdaya manusia, dimana hal ini berkenaan dengan kecakapan dari pelaksana kebijakan publik untuk carry out didalam kebijakan secara efektif. Kota batu merupakan kota yang dikenal dengan kota wisata dimana kota batu memiliki sumberdaya dan kemampuan yang cukup memadai untuk mengelola dan mengatur daerah kota batu itu sendiri. Dalam hal ini untuk mengetahui bagaimana sumberdaya alam (SDA) dan sumberdaya manusia (SDM) yang ada di daerah kota batu dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah

itu sendiri disini badan perencanaan pembangunan daerah kota batu merupakan sebagai roda untuk merencanakan kebijakan-kebijakan yang telah disepakati dalam pengimplementasian/pelaksanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi-instansi pemerintah kota baru itu sendiri, badan perencanaan pembangunan daerah merupakan sebuah badan yang merencanakan dan menentukan kebijakan yang akan dilaksanakan, semua keputusan yang mengenai pembangunan di daerah kota batu itu semua diurus oleh badan perencana pembangunan itu sendiri dan dilaksanakan oleh instansi terkait. Dari pernyataan diatas peneliti menyimpulkan bahwa sumberdaya alam/ Resource dan sumberdaya manusia yang ada di kota batu sudah cukup memadai dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2013 tentang rencana pembangunan jangka menengah.

Disposisi atau sikap (*Disposition or attitudes*).

Berkenaan dengan kesediaan dari para imlementator untuk carry out kebijakan public tersebut. Kecakapan dan Keahlian tidaklah cukup, tanpa kesediaan dan perjanjian untuk melaksanakan suatu kebijakan. Dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 tetang rencana pembangunan jangka menengah di kota batu tetu harus ada kesiapan dari pemerintah kota batu terutama dalam pelaksanaan implementasi tersebut dan juga harus ada dukungan dari masyarakat, dalam pelaksanaannya implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 ini dilaksanakan oleh badan perencana pembangunan, karena badan perencana pembangunan kota batu merupakan roda bergulirnya perencanaan segala apa yang telah di programkan dari pemerintahan kota batu, dari perspektif kesiapan pemerintah kota batu telah siap melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan telah dipersiapkan pelaksanaannya.

Struktur birokrasi (*Bureaucratic structure*).

Berkenaan dengan kesediaan dari para imlementator untuk carry out kebijakan public tersebut. Keahlian tidaklah cukup, tanpa kesediaan dan perjanjian untuk melaksanakan suatu kebijakan. Dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 tetang rencana pembangunan jangka menengah di kota batu tetu harus ada kesiapan dari pemerintah kota batu terutama dalam pelaksanaan implementasi tersebut dan juga harus ada dukungan dari masyarakat, dalam pelaksanaannya implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 ini dilaksanakan oleh badan perencana pembangunan, karena badan perencana pembangunan kota batu merupakan roda bergulirnya perencanaan segala apa yang telah di programkan dari pemerintahan kota batu, dari perspektif kesiapan pemerintah kota batu telah siap melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan telah dipersiapkan pelaksanaannya.

Dalam hal ini terdapat faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Batu, adapun faktor-faktor Pendukung Efektivitas Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Batu yakni:

Masyarakat kota batu sangat mendukung pemerintah daerahnya dalam pengembangan dan pembangunan kotanya sendiri, misalnya pemerintah kota batu mengikut sertakan dan melibat masyarakat kota batu dalam mengerjakan program kerja pemerintah kota, misalnya dalam pengawasan pelaksanaan infrastruktur jalan, dan pengembangan kepariwisataannya, pemerintah kota batu dalam pelaksanaan peraturan daerahnya tidak luput dari komunikasi kepada masyarakat, maksud saya disini dimana pemerintah daerah kota batu sebelum melaksanakan program yang telah direncanakan akan disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat. pemerintah kota batu saling mendukung satu dengan yang lain dalam pelaksanaan program kerja yang telah di rencanakan, dalam hal ini dapat dilihat dari kesadaran dan pengabdian kepada pemerintah daerah kota. Dalam pelaksanaan program kerja ini tidak semuanya berjalan mulus dan lancer tetapi pasti ada beberpa kendala yang mereka hadapi, dalam permasalahan tersebut merka saling mencari solusi untuk kesuksesan program kerja

yang telah dibuat pemerintah kota yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota, dalam hal ini sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang dimiliki kota batu sangatlah memadai dan cukup. Dan kesiapan pemerintah Kota Batu juga yang bersedia dan siap dalam melaksanakan apa yang telah menjadi program masyarakat kota batu. Dan semua yang dilaksanakan pemerintah Kota Batu itu berdasarkan acuan dari visi misi Kota Batu dan program-program kerja yang direncanakan oleh pemerintah Kota Batu. Faktor-faktor Penghambat Efektivitas Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Batu yakni:

Pekerjaan umum

Masih belum adanya pedoman yang mengatur tata cara penyelenggaraan pembangunan, infrastruktur dan sarana prasarana untuk memenuhi persyaratan teknis dan administrasi, belum/kurang optimal (kuantitas/kualitas) koordinasi perangkat di dalam organisasi pengelola kegiatan (ppk, bendahara, pengelola administrasi kegiatan, pengelola teknis kegiatan/internal).

Pariwisata

Kurangnya sarana/prasarana dalam menunjang pelaksanaan kerja, antara lain : computer, meja+kursi staf ruangan yang lebih luar, adanya kegiatan sisipan/usulan di luar agenda kerja yang telah direncanakan, tidak terealisasinya gazebo di Desa Gunungsari dikarenakan adanya pergantian Kepala Desa baru yang menyebabkan kurangnya koordinasi dengan masyarakat.

KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Batu dapat dikatakan sudah efektif, dari perspektif komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Faktor-faktor pendukung efektivitas implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Batu, Meliputi: Masyarakat kota batu sangat mendukung pemerintah daerahnya dalam pengembangan dan pembangunan kotanya sendiri, sebelum di implementasikan Peraturan daerah tersebut disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat, Pemerintah kota batu saling mendukung satu dengan yang lainnya dalam pelaksanaan program kerja yang telah di rencanakan, sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki kota batu sangat memadai, Kota Batu juga yang bersedia dan siap melaksanakan apa yang telah diprogramkan. Sedangkan, Faktor-faktor penghambat efektivitas implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Batu, meliputi: Di bidang Pekerjaan umum, masih belum adanya pedoman yang mengatur tata cara penyelenggara pembangunan, infrastruktur dan sarana prasarana untuk memenuhi persyaratan teknis dan administrasi. Kurang optimalnya (kuantitas/kualitas) koordinasi perangkat di dalam organisasi pengelola kegiatan (ppk, bendahara, pengelola administrasi kegiatan, pengelola teknis kegiatan/internal). Dibidang Pariwisata, Kurangnya sarana/prasarana dalam menunjang pelaksanaan kerja, Adanya kegiatan sisipan/usulan di luar agenda program kerja dan tidak terealisasinya gazebo di Desa Gunungsari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. 2005. *Pelaksanaan OtoNomormi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Creswell, John. 2013. *Buku Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*
- Nugroho,Rian. 2011. *Publik Policy*.Jakarta.Gramedia
- Sugiyono. 2013. *Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Wahab, Solichin Abdul. 2014. *Analisis kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Undang-Undang 25 Tahun 2005 Tentang System Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
Dan Daerah

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Batu Tahun 2012-2017